**ABSTRAK**

Permasalahan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang berjalan maksimal sehingga berdampak kepada ketentraman dan ketertiban umum, yaitu masih ditemukannya pedagang dan konsumen minuman beralkohol karena kurangnya sosialisasi dan operasi sering dimanfaatkan pedagang dan konsumen untuk tetap mengedarkan dan mengkonsumsi. Sehingga penulis mengambil judul penelitian mengenai “ Peran Satuan polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat (Studi tentang Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu)”, dengan fokus kepada Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertikan minuman beralkohol dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan fokus magang penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu penulis menggunakan teori Biddle dan Thomas. Adapun Lokus penelitian ini di Kabupaten Indramayu dengan 9 (sembilan) jumlah informan. Disertai juga dokumen yang berasal dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan dokumen dari BAPPEDA sebagai data sekunder. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol tersebut menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dalam melaksanakan perannya seperti dalam melaksanakan fungsinya, ada beberapa fungsi salah satunya adalah penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Masih ditemukan penyalahgunaan minuman beralkohol, salah satu faktornya adalah lemahnya pengawasan dan lemahnya iman masyarakat Kabupaten Indramayu sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu adalah melalui penertiban kios penjual dan produsen minuman beralkohol, sosialisasi larangan minuman beralkohol, pembinaan anggota, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kapasitas pegawai, dan sarana fisik yang mendukung.

Kata Kunci : Peran, Penertiban, Penyalahgunaan